

Forum Freedom 23, 24 Oktober 2005

Tema: Peran Politik dalam Agama

Nara sumber : Trisno S. Sutanto

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom...

Hamid Basyaib

Selamat pagi saudara, Anda berjumpa lagi dengan saya Hamid Basyaib di dalam Forum Freedom. Kerjasama antara Freedom Institute dan Radio 68h dan beberapa puluh radio lain di Indonesia. Pagi ini tema kita adalah peran politik agama. Ini tema yang sangat seksi dan hangat. Pagi ini tamu saya adalah saudara Trisno Sutanto, Direktur Program di Madia. Selamat pagi Trisno...

Trisno

Pagi Mid...

HB

Kita mau ngomong soal peran politik agama. Anda adalah orang yang tepat untuk diajak bicara soal ini. Begini duduk perkaranya: peran agama dalam politik itu sering mengemuka di dalam sejarah manusia, sebetulnya bukan hanya di Indonesia. Ini sering menghasilkan konflik dan perbedaan mengenai batas-batas yang pantas (agama): seberapa jauh agama masuk dst itu, di dalam sejarah banyak masyarakat di dunia itu melahirkan konflik yang berdarah-darah. Kalau kita ingat sejarah Eropa di Abad Pertengahan itu ketika kekuasaan gereja menyatu dengan kekuasaan politik atau kekuasaan politik dijalankan oleh penguasa-penguasa agama, itu juga banyak sekali melahirkan pertumpahan darah. Karena itu di Eropa sekarang jadi sangat sekuler. Mereka sepertinya sudah kapok karena punya pengalaman yang panjang ratusan tahun. Betapa buruknya ketika agama memasuki dunia politik atau mendominasi kehidupan politik.

Di Indonesia pun pernah mengalami itu. Waktu pertama kali negara ini didirikan, ada krisis tentang dasar negara. Kalangan Islam minta dasar negaranya Islam; kalangan nasionalis sekuler (enggak setuju), walaupun sebagian di antara mereka beragama Islam, tapi pandangan politiknya nasionalistik dan sekuler. Lalu ada kompromi. Kita kenal (tahu) bahwa kalangan Islam pada waktu itu menginginkan bunyi sila pertama itu dengan "Ketuhanan yang maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya." Ada tujuh kata. Dan akhirnya kompromi dihapus. Panjang ceritanya tapi akhirnya batal. Tapi poin pentingnya adalah bahwa dalam sejarah bangsa kita pun pernah ada suatu masa ketika bapak-bapak pendiri bangsa kita mau menentukan dasar negara yang mau dibangun ini. Dalam hal ini agama Islam. Trisno, menurut Anda, sebenarnya apa hubungan yang ideal antara agama dan politik atau kekuasaan negara itu?

TS

Begitu ya Mid... Mungkin harus mulai dari pendefinisian agama di sini (sendiri). Karena agama ini, menurut saya, bisa dilihat dari dua aspeknya yang berbeda. Aspek keyakinan, nilai-nilai moral, dsb yang terkandung di dalam ajaran-ajaran agama, dan aspek institusionalnya. Mungkin di dalam pengalaman yang panjang dalam sejarah yang tadi Anda sebutkan, khususnya di Eropa, itu adalah ketika dua aspek organisasi ini menyatu. Negara ini kan adalah sebuah organisasi, dan agama juga punya aspek organisasional.

HB

Agama apapun ya?

TS

Ya, bahkan Katolik struktur hirarkinya sangat jelas. Dan ketika kedua ini menyatu, ibaratnya tidak ada lagi yang sudah bisa dijadikan batasan untuk melakukan kritik terhadap kekuasaan yang menggumpal di tangan satu orang. Ini menjadi persoalan yang paling berbahaya ketika kekuasaan agama dan kekuasaan negara menyatu.

HB

Di mana bahayanya?

TS

Karena keduanya seperti meminta kehendak/ketaatan mutlak dari para pengikutnya. Sebagai seorang warga negara kita rela mati untuk membela negara kita. Begitu juga sebagai seorang beragama kita rela mati untuk membela negara kita. Begitu juga sebagai seorang beragama rela mati untuk menjaga akidah kita, iman kita.

HB

Maksud Anda kalau kedua hal itu menyatu, kerelaan mati itu bisa *double* ya?

TS

Ya, bisa *double* dan tidak ada ruang lain. Ini yang jadi masalah. Karena saya kira cuma dua institusi (negara dan agama) ini yang menuntut ketaatan sedemikian mutlak. Sampai-sampai orang mau mati untuk itu. Yang satu mau jadi patriot, yang satu menjadi syahid atau martir. Karena itu di dalam pengalaman sejarah di Eropa seperti tadi yang sudah Anda sebut, khususnya seperti Prancis yang paling kelihatan karena perancis dulu disebut sebagai putri gereja Katolik. Ketika mereka dan mereka mengalami persoalan besar ketika kekuasaan agama dan negara ini mau menguasai hampir seluruh aspek kehidupan, pengap rasanya hidup seperti itu, maka mereka memberontak dan pemberontakan yang sangat ekstrim. Di Prancis itulah gerakan kaum awam sampai menuju kepada de-klerikasi, penghancuran seluruh kleriks (ulama-ulama Katolik)

HB

Dinetralisasi ya?

TS

Ya, dinetralisasi habis-habisan.

HB

Dengan kekerasan juga?

TS

Ya. di Prancis juga ada sebuah pandangan sekulerisme yang sangat ekstrim, yang mau memisahkan/membuang pandangan (ada yang terpotong) keagamaan dalam kehidupan publik. Ini menurut saya karena kepengapan tadi. Beda sekularisasinya dengan negara-negara lain. Jadi menurut saya

ketika kita berbicara sekularisasi nantinya sebagai ujung dari pergulatan ini, ini hanya dimungkinkan kalau ada pemisahan yang bersifat structural tadi, organisasional. Di dalam pengalaman kita di Indonesia, khususnya di lingkungan Islam yang secara organisasional itu tidak ada struktur yang sangat jelas, pemisahan agama dan politik akan sangat menyusahkan. Harus dicari keseimbangan yang dinamis. Kalau dalam istilah almarhum Pendeta Eka Darmaputra, saya suka dengan apa yang dia kemukakan mengenai hubungan agama dan negara di sini, menurut dia sesungguhnya harus dicari adalah sebuah keseimbangan dinamis antara kedua ini. Tidak bisa ada sebuah separasi total, tetapi harus ada keseimbangan. Dalam artian bahwa agama lalu memiliki daya kritis yang tetap bisa mengkritisi negara, dan negara juga punya kewajiban-kewajiban terhadap agama.

HB

Artinya negara berkewajiban juga mendengarkan aspirasi agama?

TS

Betul. Apalagi kita tahu di Indonesia kalau agama itu menjadi bahasa yang masih sangat kuat dipakai di dalam konteks keindonesiaan.

HB

Anda menyinggung-nyinggung soal hubungan dinamis dsb, dan Anda mengatakan bahwa di Perancis itu ada kelompok sekular ekstrim yang ingin memisah tajam (peran negara dan agama). Menurut Anda, seberapa jauh agama masuk ke dalam wilayah politik?

TS

Sebagai sebuah nilai-nilai moral, agama sesungguhnya sangat terkait dengan politik itu. Kalau politik itu masih ditempatkan di dalam kerangka moral. Karena itulah di awal tadi saya mau membedakan dulu agama dari aspek organisasi dengan agama sebagai nilai. Saya kira dalam aspek moral dan nilai-nilai ini agama punya peran yang besar sebagai suara kritis terhadap negara.

HB

Artinya apa, perannya besar kalau politiknya immoral, misalnya tidak adil, tidak memperhatikan kelompok yang lemah tetapi lebih berpihak pada orang kaya. Maksud Anda agama bisa menyuarakan yang lemah itu?

TS

Ya, agama bisa menyuarakan kepentingan yang lemah itu. Agama menyuarakan tuntutan keadilan itu. Di dalam tradisi Reformasi Protestan, misalnya, Calvin mengajarkan bahwa orang harus mentaati penguasa. Karena penguasa itu juga diberikan oleh Tuhan. Tetapi kalau penguasa itu melakukan tindakan immoral maka orang beriman juga dituntut untuk melakukan resistensi terhadap itu.

HB

Tapi begini. Sebagian orang juga mengkritik: artinya apakah kontrol atau kritik terhadap negara seperti itu hanya mungkin dari agama. Apakah tanpa campur agama suara kritis atau suara yang moralistik itu tidak akan muncul?

TS

Menurut saya, sesungguhnya bisa tanpa campur tangan agama. Tetapi agama adalah inspirasi yang bisa juga memberi kontribusi signifikan dalam soal ini.

HB

Atau Anda ingin bilang bahwa bagaimanapun agama itu sudah menjadi realitas. Misalnya di Indonesia, begitu banyak orang yang beriman atau memeluk agamanya dengan sangat taat atau serius sehingga kehadiran agama tidak bisa diabaikan. Karena udah jelas enggak bisa diabaikan, lebih baik dimanfaatkan ya?

TS

Karena sampai sekarang bahasa yang kita miliki satu-satunya adalah agama. Apalagi di Indonesia. Hampir semua aspek kalau belum dibungkus dengan bahasa agama seperti belum berbunyi. Ini menurut saya kesempatan buat seluruh agama untuk melakukannya. (Itu pun) kalau dia tetap bersandarkan pada moralitas tadi, nilai-nilai moral itu.

HB

Anda enggak khawatir bahwa campur tangan agama dalam wilayah politik itu akan melahirkan teokrasi misalnya. Sebuah negara yang dipimpin oleh pemimpin agama?

TS

Di sinilah pentingnya pembedaan tadi. Saya masih beranggapan bahwa sebagai nilai-nilai moral, agama bisa mempengaruhi kekuasaan. Tetapi saya menolak kalau seandainya agama dalam pengertian institusional yang masuk ke dalam kekuasaan. Ini pembedaannya. Karena seringkali agama sebagai institusi itu justru—seperti institusi social lainnya, ini hukum besi sosiologi—setiap institusi akan selalu menguntungkan bagi mereka yang berada di tengah. Mereka yang mayoritas di dalam institusi itu. Itu logis dari sebuah institusi. Karena itu ketika institusi agama merangkul kekuasaan negara, ada penyatuan antara institusi negara dengan institusi agama yang anda sebut sebagai teokrasi itu, di situ dia hanya menguntungkan satu kelompok.

HB

Dalam hal ini kelompok yang menganut agama itu?

TS

Ya, kelompok yang menganut agama itu...

HB

Dalam kenyataannya belum tentu.

TS

Misalnya sebagai contoh?

HB

Misalnya, bahkan orang-orang yang beragama serupa pun, misalnya saya orang Islam. Begitu kekuasaannya atas nama Islam, saya orang yang beragama Islam pun belum tentu diuntungkan, bisa sangat dirugikan kalau saya punya pemahaman yang berbeda dengan para ulama yang kebetulan memegang kekuasaan. Dalam kenyataan kan seperti itu. Misalnya di Iran...

TS

Karena logika institusi itu tadi akan memenangkan kelompok-kelompok dominan di dalam institusi itu.

HB

Hanya kelompok dominan ya, tidak seluruh pengikutnya?

TS

Ya, karena agama juga *multi interpretable*. Sehingga kelompok-kelompok yang kritis dan mau memberikan interpretasi baru pun itu dianggap sebagai ancaman oleh kelompok dominan ini. Tapi saya kira harus ada pemisahan di antara dua institusi itu. Namun sebagai sebuah nilai-nilai, agama sesungguhnya bisa memberikan inspirasi terus menerus

kepada upaya untuk perbaikan nasib masyarakat. Saya selalu suka dengan istilah yang dulu didengungkan Gus Dur: Agama itu inspirasi, bukan aspirasi

HB

Sebagai inspirasi, dia mengilhami orang dengan nafas dan nilai-nilainya. Sebagai aspirasi, dia menjadi forum/pergulatan politik.

HB

Tris, dari tadi kita sudah ngomong soal campur tangan (negara). Seberapa jauh agama boleh masuk wilayah politik dan intinya Anda mengutip Gus Dur, yang bilang bahwa agama itu dalam hubungannya dengan politik atau kekuasaan negara ringkasnya adalah sebagai inspirasi, bukan sebagai aspirasi. Coba kita mau lihat contoh-contoh kongkrit. Kita tadi sudah ngomong bagaimana Eropa di Abad Pertengahan yang saking gelapnya maka disebut juga abad kegelapan, karena dominasi kekuasaan politik oleh kalangan agamawan, oleh gereja Katolik, yang menguasai semua aspek kehidupan masyarakat. Dan akibatnya jelas: kehidupan ekonominya mandeg, kehidupan sosialnya pun beku, politik tidak berkembang, kebebasan masyarakat hilang, dan sains dan teknologi tidak berkembang. Kita banyak sekali mendengar bagaimana ilmuwan dikucilkan, buku-bukunya dibakar dan dilarang, dan banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Demokrasi pun mati. Nah, menurut Anda, bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia belajar dari kasus ini? Dari pengalaman Eropa yang gelap dan berdarah-darah itu?

TS

Tadi Anda menyebut sebuah istilah yang menurut saya ini menjadi fokus dan kemudian menjadi sebuah pergulatan di Eropa adalah demokrasi itu. Demokrasi itu kan berlandaskan kepada kebebasan dan hak-hak individu; penghormatan terhadap hak-hak individu; penghormatan bahwa setiap individu memiliki dirinya, personnya yang diakui martabatnya setara. Ini yang sesungguhnya menjadi landasan. Karena kebebasan individu ini ketika diakui dan dijamin oleh konstitusi, khususnya, maka dia sesungguhnya akan menjadi sebuah tameng yang cukup kuat untuk menahan aspirasi yang terus menerus atas nama agama. Menurut saya apa yang dilakukan akhir-akhir ini tentang aspirasi umat Islam untuk menerapkan syariat Islam itu juga sebuah, kalau menurut saya, itu lebih banyak aspirasi ketimbang inspirasi.

Dan kelihatan jelas di dalam fenomena yang kita amati di daerah-daerah khususnya, aspirasi itu timbul hanya ketika saat-saat politik lokal tertentu, saat-saat ada sebuah kepentingan politik memainkan isu itu.

HB

Pemilihan bupati?

TS

Pemilihan bupati, atau daerahnya mau mendapatkan otonomi khusus, dst. Atau kadang-kadang untuk menutupi cacatnya si bupati di bidang lain.

HB

Misalnya apa? Public servicenya buruk?

TS

Ya, atau untuk menutupi korupsi yang disembunyikan. Di situlah kemudian agama dipakai. Menurut saya, kalau kita belajar dari pengalaman di Eropa yang menunjukkan bahwa betapa berbahayanya kalau kedua institusi ini bergabung. Yang tadi kita gunakan istilah kesetiaan ganda untuk berani mati. Menurut saya kita harus memperkuat sendi-sendi kebebasan

hak-hak martabat individu, dan di sinilah peran konstitusi menjadi kunci sekali. Saya kira Pancasila masih tetap merupakan temuan yang jenial untuk melakukan itu. Dan kita harus bersyukur bahwa atas usaha Muhammad Hatta sehingga kalimat yang kontroversi itu berhasil dihapuskan dari rumusan Pancasila. Hatta melihat arah itu.

HB

Visinya jauh ke depan ya. Artinya Anda mau mengatakan bahwa jaminan untuk negeri kita tidak tergelincir ke arah teokrasi itu adalah penguatan demokrasi?

TS

Penguatan demokrasi konstitusional. Artinya demokrasi yang dijamin pelaksanaannya dan dijaga oleh konstitusi secara konsekwen oleh pemerintah.

HB

Artinya semua harus tunduk kepada konstitusi sebagai aturan main bersama. Ya, kita (membicarakan hal-hal) lihat ke negara-negara kongkrit. Dari tadi kita membicarakan hal-hal teoritis. Sekarang kita lihat di dunia Islam, negara-negara yang menggunakan Islam sebagai basis legitimasi, misalnya Afganistan, Irak, Pakistan, dan yang paling mencolok adalah Saudi Arabia. Di negeri-negeri itu dapat dikatakan agama begitu mendominasi semua aspek kehidupan social politik masyarakat. Tentu saja yang dimaksud agama di sini adalah model atau bentuk penafsiran tertentu yang kebetulan cocok dengan selera kekuasaan. Atau yang lebih parah lagi adalah justru model atau bentuk penafsiran tertentu itu memang dibikin atau dipesan oleh mereka yang sedang berkuasa. Saya kira dalam kasus Saudi sangat jelas sekali. Mesir juga sampai batas tertentu sering misalnya mufti Al Azhar itu bikin fatwa-fatwa yang cocok dan sejalan dengan kepentingan presiden waktu itu. Tapi akibatnya dari dominasi agama itu kebebasan sipil dan hak asasi manusia ditindas. Kaum perempuan juga ditindas. Misalnya di Afganistan sudah jelas. Di Saudi, negeri yang begitu modern dalam arti fisik, tapi perempuannya ditindas (nggak boleh punya KTP, enggak boleh menyetir mobil sendiri, dll). Namun semua itu diterima oleh masyarakatnya dengan alasan agama. Mereka bilang bahwa agama menetapkan hal seperti itu. Begitu banyak daftar larangan terhadap perempuan. Intinya adalah demokrasi mati. Begitupula dengan Indonesia. Indonesia ini juga sedang berdenyut teru. Menurut Anda, apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pelajari dari pengalaman negeri-negeri lain itu?

TS

Ya, kalau menurut saya pengalaman itu menggarisbawahi lagi bahwa betapa berbahayanya kalau kedua kekuatan institusi sosial ini disatukan. Karena memang kemudian tidak terbuka ruang apapun untuk melakukan kritik. Sementara kekuasaan itu memang cenderung selalu korup. Dan *absolute power tends corrupt absolutely*. Ini yang menjadi problem.

HB

Atas nama apapun ya?

TS

Ya. Saya kalau mendengar cerita Anda tentang di Arab Saudi, saya yakin sekali Islam sebagai agama tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Tetapi Anda tadi mengatakan, itulah tafsir yang memang dipesan oleh penguasa dan ini untuk menjaga kekuasaan. Tapi memang ya Mid, yang susah adalah bahwa di dalam studi-studi agama orang mengakui juga bahwa agama memang memiliki dimensi kekuasaan yang demonic, yang cukup

berbahaya kalau tidak dikendalikan. Jadi istilahnya hierofani, penampakan yang suci dari agama selalu juga punya aspek kratofani, penampakan dari kekuasaan.

HB

Prince of darkness?

TS

Ya. Dua aspek ini memang harus dikendalikan terus. Saya kira di situlah fungsi utama dari suara-suara kritis. Tetapi ini mengandaikan bahwa memang masih terbuka kemungkinan ada ruang-ruang yang dibuka untuk suara-suara kritis ini dijaga. Ini yang mungkin harus kita perhatikan terus menerus khususnya dalam konteks Indonesia. Artinya bagaimana kelompok-kelompok kritis ini masih tetap memerankan atau memberikan tafsir-tafsir yang berbeda. Tetapi ketika kekuasaan atawa agama yang dominan itu mengambil alih kekuasaan untuk menindas suara-suara kritis, ini lonceng kematian sudah berbunyi.

HB

Itu yang saya kira terjadi di negeri-negeri yang baru saya sebut tadi itu, tapi saya lupa mengambil contoh yang juga sangat mencolok: Iran. Iran itu kita tahu (menganut) teokrasi yang dimodifikasi. Ada pemilu, ada presiden, tetapi sebenarnya kekuasaan tertinggi bukan di tangan presiden terpilih. Kekuasaannya ada di tangan para supreme leader, dan di bawah dia ada dua belas pengawal konsitusi. Coba bayangkan. Ini luar biasa aneh. Pemilu di Iran beberapa bulan lalu itu, Mahmud Ahmadinejad itu memenangkan pemilihan di sana. Tetapi kalau saja Ali Khamenei itu memveto hasil pemilu rakyat itu, itu disahkan. Jadi hasil pemilu itu bisa sia-sia. Walaupun secara praktis tidak pernah terjadi. Tapi sistemnya memungkinkan.

TS

Sekarang persoalannya adalah bagaimana menjaga ruang-ruang untuk suara kritis ini. Dan memang prospek ke depan agak suram.

HB

Kenapa Anda bilang suram?

TS

Karena kenaikan khususnya sekarang ini, kalau kita melihat tren global saja bagaimana agama yang muncul ke permukaan itu adalah sisi konservatif yang menguat. Bukan sisi-sisi yang membebaskan dari agama.

HB

Padahal sisi yang membebaskan itu Anda meyakini ada?

TS

Menurut saya ada. Selama agama-agama itu kembali kepada nilai-nilai panggilan moralnya yang paling dalam, menurut saya, ada. Karena di situlah sesungguhnya seluruh nilai-nilai kemanusiaan menemukan basis dan inspirasinya. Hanya memang ketika kita berbicara pada level politik, kita berbicara pada perhitungan siapa yang kuat. Kita melihat sendiri misalnya pemilu terakhir di Jerman. Kelompok yang memenangkannya adalah kelompok Kristen yang konservatif.

Nilai-nilai konservatisme memang sangat menanjak akhir-akhir ini. Mungkin karena kebingungan kita menghadapi *runaway world* ini, dunia yang tunggang langgang ini.

HB

George Bush juga menang tipis karena didukung oleh kaum Kristen fundamentalis konservatif?

TS

Dan sekarang makin kelihatan bagaimana Bush menjalankan program politik yang landasannya adalah tafsir tertentu terhadap agama. Ini tren yang agak mengerikan. Tapi kalau dari pengalaman sejarah kekeristenan, saya belajar bahwa perjuangannya jangka panjang sekali. Dan ini kembali lagi kepada bagaimana kita mensosialisasikan agama; bagaimana orang memahami agama dalam kehidupannya. Perjuangan (mensosialisasikan) ini berjalan dari generasi ke generasi.

HB

Tapi bagaimana kalau agama dikembalikan ke ruang privat saja?

TS

Menurut saya tidak adil juga.

HB

Karena agama punya ide-ide sosial?

TS

Betul. Karena dia punya inspirasi dan inspirasi moral tadi yang menghendaki tindakan-tindakan sosial politik.

HB

Sesungguhnya dari segi itu sangat sehat ya?

TS

Ya. hanya bagaimana menjaga relasi yang dinamis antara kekuasaan negara dan agama sebagai nilai-nilai. Ini yang menjadi masalah kita terus menerus.

HB

Anda lihat di Indonesia (persoalan) ini tetap menjadi masalah..

TS

Ini tetap menjadi masalah karena apalagi sekarang wacana tentang pancasila seperti sudah ditinggalkan begitu saja. Sehingga kita sedang mencari-cari landasan hidup kita itu seperti apa.

HB

Tapi secara formal Pancasila masih diakui, dan karena itu Pancasila perlu terus dihidupkan lagi. Karena dia belum mati dan secara resmi masih menjadi dasar negara kita.

TS

Tapi konstitusi kan bukan hanya formal. Konstitusi juga terus meminta kita untuk memberikan plebisit tiap hari.

HB

Ok, mudah-mudahan kita rajin dan tidak kapok untuk memberi plebisit setiap hari. Tris, terima kasih atas kehadiran Anda. Saudara, begitulah forum freedom hari ini. Terima kasih...